

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penulis akan memaparkan hasil analisis mengenai penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dan mengkaji dokumen penelitian yaitu tentang “Manajemen Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang “. Pada bab ini pembahasan mengenai hal tersebut akan dianalisis menggunakan studi pustaka yang terkait dengan judul di atas.

Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka yang berperan sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dan daerah terbuka atau area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Di dalam prakteknya, keberadaan Ruang Terbuka Hijau dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, yang mana suatu wilayah/ kota harus memiliki keberadaan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30 persen dari luas wilayahnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, penambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya dominasi bangunan lahan kota yang berdampak pada keseimbangan ekosistem kota dengan indikasi penurunan kualitas lingkungan perkotaan. Pertambahan jumlah penduduk kota berarti juga peningkatan kebutuhan ruang, karena ruang tidak dapat bertambah yang terjadi adalah perubahan penggunaan lahan yang cenderung menurunkan proporsi lahan-lahan yang sebelumnya merupakan Ruang Terbuka Hijau.

Manajemen lingkungan yang baik praktis diperlukan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Manajemen lingkungan merupakan sekumpulan aktifitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, dan pengawasan untuk mencapai kualitas lingkungan yang baik atau menjaga kelestarian lingkungan. Penciptaan Ruang Terbuka Hijau yang ideal merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam manajemen lingkungan. Aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan menjadi hal yang harus diperhatikan secara serius supaya pengelolaan ruang terbuka hijau dapat berjalan dengan optimal dan menciptakan ruang terbuka hijau yang ideal.

Di dalam memadukan fungsi-fungsi dari manajemen tersebut tidaklah hal yang mudah karena masalah-masalah akan muncul dalam setiap fungsi manajemen. Seperti halnya dalam kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau. Untuk melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau tidak bisa terlepas dari kendala-kendala yang akan ditemui.

Pada Bab ini peneliti akan membahas tentang Manajemen Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang merupakan pelaku dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang. Untuk lebih mengetahui Manajemen Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dapat dilihat berdasarkan pemaparan berikut :

4.1 MANAJEMEN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SEMARANG

Secara umum kondisi keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang jika menurut kriteria Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 adalah sebesar 52,31% dari luas wilayahnya, sedangkan jika menurut kriteria Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang hanya seluas 7,5% dari seluruh wilayahnya. Secara kualitas fungsi, peranan dan manfaat Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang masih belum tercapai menurut amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang RTH.

Di dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan dan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan harus ditata, diorganisir dan dijalankan menurut konsep-konsep manajemen lingkungan modern yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi manajemen lingkungan.

Banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau yang belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kegagalan demi kegagalan antara lain disebabkan oleh masalah manajemen yang kurang tepat. Manajemen Ruang Terbuka Hijau merupakan merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas Ruang terbuka Hijau, sebab itu manajemen diupayakan seefektif mungkin untuk mampu meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau di kota Semarang. Manajemen diakui sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Peranan manajemen demikian signifikan dalam meningkatkan kualitas Ruang

Terbuka Hijau di Kota Semarang. Karena kegiatannya meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil pembahasan dari penelitian mengenai studi kualitatif tentang Manajemen Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang. Data-data yang ada berasal dari wawancara yang telah dilakukan dengan informan-informan, pengamatan-pengamatan, dan data-data *existing* di lapangan. Data-data yang diperoleh akan disesuaikan dengan fungsi-fungsi manajemen yang telah ditentukan yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dijelaskan pula analisis mengenai fakto-faktor yang menjadi penghambat dalam Manajemen Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang. Data-data yang diperoleh akan disesuaikan dengan fenomena-fenomena manajemen yang telah ditentukan yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

4.2 PERENCANAAN

Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang sudah tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam suatu organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian pada bab tiga menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di dalam mengelola ruang terbuka hijau belum optimal. Hal ini dapat diketahui dari langkah-langkah proses perencanaan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam mengelola ruang terbuka hijau.

1. Menentukan tujuan, sasaran atau visi misi

Perencanaan yang baik diawali dengan adanya tujuan, sasaran atau visi misi yang jelas. Pengetahuan terhadap tujuan, sasaran atau visi misi organisasi adalah hal mutlak yang seharusnya pegawai bukan hanya mengetahui namun juga pahami. Dengan mengetahui tujuan, sasaran atau visi misi organisasi kita akan mengetahui mengapa kita harus mencapai visi misi organisasi, kenapa kita harus mengerjakan pekerjaan yang kita lakukan sekarang dengan baik, dan sejauh mana pekerjaan yang kita lakukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam mengelola ruang terbuka hijau sudah menentukan tujuan, sasaran atau visi misi dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari tujuan, sasaran atau misi yang ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya RTH yang memadai, bersih dan bebas dari polusi, dan ingin meningkatkan mutu kualitas lingkungan hidup di kota Semarang.

2. Merumuskan/ membuat kebijakan

Adanya visi, misi dan tujuan yang jelas untuk saat ini belum cukup mengingat masih rendahnya kualitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Untuk

mencapai sasaran pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, diperlukan arah kebijakan yang jelas dan terarah dalam tahapan-tahapan rencana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya mengingat masih rendahnya kualitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau di kota Semarang belum mempunyai kebijakan yang jelas dan terarah. Hal ini dapat diketahui dengan adanya permasalahan kekurangan SDM tenaga pakar *lanscape* dari komponen SDM di bidang pertamanan dan pemakaman, oleh kare itu kedepannya bidang pertamanan dan pemakaman akan mencari dan menambah tenaga-tenaga *lanscape* untuk perencanaan pembangunan taman yang ada di kota Semarang.

3. Menyusun target atau skala prioritas

Kota Semarang memiliki kondisi Ruang Terbuka Hijau yang berdasarkan kualitas, fungsi, peranan dan manfaat masih belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kondisi Ruang Terbuka Hijau seperti ini patut unuk dikembangkan supaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan adanya RTH yang memadai dan meningkatkan mutu kualitas lingkungan di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang sudah menyusun target atau skala prioritas dengan baik. Adapun

yang menjadi prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah :

- a. Pembangunan kawasan pinggiran
- b. Susunan target sesuai perencanaan, artinya perencanaan muncul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengikuti saran dan usul masyarakat
- c. Pengalihan kawasan industri

4.3 PENGORGANISASIAN

Fenomena kedua yang dianalisis untuk mengetahui manajemen pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah pengorganisasian. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi, sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasinya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi, serta mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa pengorganisasian yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di dalam mengelola ruang terbuka hijau dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat diketahui dari beberapa kegiatan pengorganisasian yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam mengelola ruang terbuka hijau.

1. Membagi pekerjaan dalam tugas operasional

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang melalui bidang pertamanan dan pemakaman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pertamanan dan pemakaman
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi walikota
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program bidang pertamanan dan pemakaman
4. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pertamanan dan pemakaman
5. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang pertamanan dan pemakaman
6. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan

Pembagian kerja haruslah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya, hal ini untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan dan hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya bahwa pembagian kerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang khususnya Bidang Pertamanan dan Pemakaman di dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau sudah sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing dan semuanya saling mengawasi.

2. Menempatkan orang pada pekerjaan atau posisi yang tepat

Tataran kepegawaian di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang khususnya Bidang Pertamanan dan Pemakaman sendiri sudah banyak orang yang berlatar belakang pendidikan yang tinggi namun pada kenyataan di lapangan masih ada pegawai tersebut yang tidak sesuai latar belakang pendidikan dengan jabatan yang diembannya. Berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan informan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penempatan pegawai masih kurang sesuai. Hal tersebut terlihat dari staf di bidang pertamanan dan pemakaman yang menolak untuk diwawancarai diakibatkan, karena takut tidak bisa menjawab saat diwawancarai.

3. Menciptakan struktur yang sesuai secara fungsional dan sosial

Dengan adanya prospek yang besar di Bidang Penataan Ruang maka guna mengoptimalkan hal tersebut dibentuklah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Pembentukan struktur yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang telah disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan saat ini.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang melalui Bidang Pertamanan dan Pemakaman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pertamanan dan pemakaman
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi mis walikota

3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program bidang pertamanan dan pemakaman
4. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pertamanan dan pemakaman
5. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang pertamanan dan pemakaman
6. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang khususnya Bidang Pertamanan dan Pemakaman di dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau kaitannya dengan penetapan struktur yang sesuai sudah baik. Hal ini dapat diketahui karena secara struktur sudah ada susunan yang jelas, yaitu dengan dibentuknya SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) sehingga membuat tugas yang dikerjakan menjadi terkoordinasi dengan baik.

4. Koordinasi semua pekerjaan bawahan

Koordinasi yang dilakukan oleh bawahan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hirarki tugas dan kewenangan yang dilakukan dari atasan hingga bawahan, dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi kebijakannya. Dalam pelaksanaan kebijakan sendiri, koordinasi dirasakan sudah berjalan optimal karena banyaknya tugas yang diberikan kepada bawahan sehingga koordinasi harus dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan ditemukan dalam segi koordinasi, koordinasi antar pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang khususnya

Bidang Pertamanan dan Pemakaman sudah berjalan dengan baik. Hal ini diakibatkan adanya semacam penilaian SKP yang dilakukan tidak hanya setahun sekali tetapi dilakukan setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun ada laporannya.

4.4 PENGGERAKAN

Penggerakan sangat erat kaitannya dengan koordinasi. Dengan adanya koordinasi dapat menghindari kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan kesimpangsiuran didalam bertindak antara orang-orang yang terlibat dalam mencapai tujuan. Koordinasi mengajak semua pihak yang terlibat dan SDM yang tersedia untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya dan data serta pengamatan yang dilakukan di lapangan ditemukan penggerakan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang belum optimal. Hal ini dapat diketahui dengan kegiatan penggerakan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam mengelola ruang terbuka hijau.

1. Mengupayakan adanya partisipasi dari semua pihak yang terlibat

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di bidang Pertamanan dan Pemakaman senantiasa selalu mengupayakan adanya partisipasi dari semua *stakeholder* agar tercipta kondisi yang harmonis yang pada akhirnya akan menunjang perkembangan RTH di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan data yang diperoleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang melalui bidang Pertamanan dan Pemakaman sudah melakukan koordinasi yang baik dengan pihak

yang terlibat/ masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dari semua stakeholder dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas ruang Terbuka Hijau. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan kegiatan antara lain :

- 1) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sebagian taman di Kota Semarang
- 2) Memberikan sosialisasi pembinaan terhadap masyarakat secara langsung melalui kelurahan/ kecamatan maupun lewat media-media.

2. Memberikan motivasi

Motivasi merupakan salah satu yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan, terutama motivasi di antara pegawai dan motivasi yang diberikan atasan kepada bawahan. Motivasi yang diberikan berupa motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal untuk meningkatkan gairah kerja dan eksternal dengan memberikan *reward* yang berupa penyelenggaraan perjalanan wisata bagi pegawainya. Disamping itu motivasi dapat diberikan melalui kegiatan antara lain :

- 1) Rapat pengarahan dan evaluasi kegiatan
- 2) Tinjauan ke lapangan oleh pimpinan
- 3) Intensif berupa tunjangan perbaikan penghasilan
- 4) Pemberian honor melalui kegiatan-kegiatan
- 5) Pemberian pelatihan yang nantinya mengembangkan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan pengamatan kepada sejumlah informan, dapat ditarik kesimpulan motivasi yang terjadi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang khususnya bidang

Pertamanan dan Pemakaman dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang sudah optimal. Hal ini dikarenakan pimpinan sering mendatangi dengan tujuan memberikan pengawasan terhadap bawahan, pimpinan ikut turun ke lapangan mendampingi staf, dan memberikan arahan-arahan pembinaan melalui pimpinan agar pekerjaan sesuai dengan *job description*.

3. Mengembangkan potensi bawahan secara optimal

Salah satu yang membuat kualitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah masih kurang pengembangan potensi dari staf-staf yang ada, sehingga diperlukan pola pengembangan potensi yang baik kepada staf-staf atau pegawai yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya pola pengembangan potensi bawahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang khususnya bidang Pertamanan dan Pemakaman masih kurang optimal. Hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai yang mengatakan sangat jarang pemberian kesempatan pendidikan bagi pegawai.

4.5 PENGAWASAN

Fenomena selanjutnya yang diteliti untuk melihat manajemen pengelolaan ruang terbuka hijau kota Semarang yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah pengawasan. Pengawasan bukanlah hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program dan aktifitas organisasi, namun juga mengawasi seluruh kegiatan organisasi, sehingga bila perlu dapat mengadakan tindakan koreksi. Inti dari pengawasan adalah proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan data yang diperoleh menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam mengelola ruang terbuka hijau sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Dibawah ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses pengawasan :

1. Menetapkan standar atau ukuran

Kaitannya dengan pengawasan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berpedoman dengan prinsip transparansi yang berarti agar adanya keterbukaan antar pegawai. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan pengamatan standar yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Semarang khususnya bidang Pertamanan dan Pemakaman di dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang sudah optimal. Hal ini dapat diketahui dengan mengadakan rapat pertemuan seminggu sekali yang bertujuan untuk mengetahui keluhan-keluhan yang ada dan inovasi-inovasi yang ada, dan membentuk tim pengawas di lapangan. Hal ini juga terbukti saat selesai melakukan wawancara informan langsung ikut menghadiri rapat pertemuan yang dilakukan seminggu sekali.

2. Menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya bentuk perubahan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang khususnya bidang Pertamanan dan Pemakaman di dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sudah optimal. Hal ini dapat diketahui dari melakukan

pembangunan di kawasan pinggiran dan tidak hanya berfokus di kawasan perkotaan, melakukan pembangunan taman baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan melakukan pengembangan di bidang SDM dengan menambah jumlah personel pengelola taman.

3. Proses akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya untuk akuntabilitas di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahun akan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) baik untuk anggarannya maupun pelaksanaannya, selain itu bisa tercermin dari komitmen atasan dan staf dalam menaati hal tersebut. Di samping itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang telah memiliki Rencana Kerja (Renja) dan mengadakan pertemuan yang dilakukan setiap seminggu sekali.

4. Mengevaluasi kinerja

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, hal yang tidak kalah pentingnya dari suatu proses kebijakan ialah mengevaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan kondisi di lapangan, dengan cara tersebut maka dapat diketahui apakah kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau belum.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui wawancara dengan pegawai di lingkungan dinas, maka dapat diperoleh hasil bahwa tahap pelaksanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang sudah dilaksanakan hingga saat ini sudah

cukup sebanding dengan rencana yang ditetapkan, karena adanya peningkatan dari kualitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang dari tahun sebelumnya.

4.6 Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang

Sebuah kebijakan yang sebelumnya telah direncanakan sebaik mungkin tetap saja menemukan hambatan-hambatan yang muncul. Oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis mengamati gejala-gejala untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Gejala-gejala tersebut baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Hambatan dari faktor internal yaitu berkaitan dengan kondisi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang itu sendiri khususnya bidang Pertamanan dan Pemakaman. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti masalah utama adalah faktor Sumber Daya Manusia yang ada pada bidang Pertamanan dan Pemakaman, karena masih terbatasnya kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia manusia yang ada. Untuk masalah kualitas bidang Pertamanan dan Pemakaman kekurangan sumber daya manusia di bidang lanscape pembangunan taman atau tenaga ahli pakar di bidang taman, sedangkan masalah kuantitas bidang Pertamanan dan Pemakaman kekurangan jumlah personel pengelola taman.

b. Faktor Eksternal

Hambatan dari faktor eksternal yaitu berasal dari luar lingkungan dinas. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti masalah utama adalah faktor kebudayaan dari masyarakat di Kota Semarang. Belum adanya kesadaran dari masyarakat sendiri, karena orang Semarang bukan hanya orang Semarang semua tetapi ada juga urban dari beberapa wilayah. Seperti misalnya, banyak demo-demo dari masyarakat/ LSM yang tidak bertanggungjawab merusak taman, adanya pencurian tanaman-tanaman bagus di perkotaan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menjadi kendala yang sangat berpengaruh dalam proses pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang.

4.7 Upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang

Suatu permasalahan yang muncul pasti ada jalan keluar untuk memecahkannya, begitu juga dengan munculnya hambatan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, sehingga seluruh staf telah membuat penyelesaian yang dianggap tidak menimbulkan permasalahan baru lagi.

Kaitannya dengan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang khususnya bidang Pertamanan dan Pemakaman melakukan beberapa upaya antara lain :

- 1) Hambatan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di bidang Pertamanan dan Pemakaman yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengusahakan mempunyai tenaga ahli sendiri di bidang taman
- 2) Hambatan yang disebabkan oleh rendahnya kuantitas sumber daya manusia yang ada di bidang Pertamanan dan Pemakaman yaitu dengan cara melakukan penambahan jumlah personel pengelola taman
- 3) Hambatan yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat kota Semarang yaitu dengan cara membentuk tim pengawas lapangan atau tim BUSER untuk menjaga kualitas lingkungan di kota Semarang dengan memberikan pembinaan-pembinaan dan mengatur jadwal agar tim ini bekerja maksimal.